



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

**BAPPEDA KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2025**

**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya semata, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2025 dapat tersusun dengan baik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai media pertanggungjawaban berisi informasi capaian atas kinerja instansi pemerintah berupa laporan rutin tahunan, yang berfungsi sebagai umpan balik pengambilan keputusan pihak-pihak terkait, alat perbaikan manajemen pemerintahan dilingkungan instansi pemerintah.

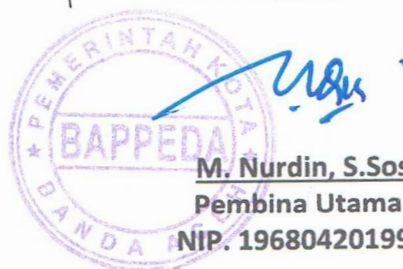
Penyusunan (LKjIP) Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2025 mengacu pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Dengan berpedoman pada hal-hal tersebut diatas Bappeda Kota Banda Aceh sebagai bagian dari Pemerintah Kota Banda Aceh telah berupaya menyampaikan laporan atas kinerja yang dilaksanakan dalam Tahun 2025 dalam bentuk laporan pertanggungjawaban yang terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Demikian semoga laporan ini berguna dan bermanfaat.

Banda Aceh, 2 Februari 2026

Plt. Kepala Bappeda Kota Banda Aceh


M. Nurdin, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196804201990111001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	1
1.3. Gambaran Umum Organisasi	2
1.4. Dasar Hukum	6
1.5. Permasalahan Dan Isu Strategis	7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	1
2.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	1
2.2. Perencanaan Strategis.....	1
2.3. Rencana Kerja, Program, dan Kegiatan Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2025	6
2.4. Perjanjian Kinerja	22
2.5. Penganggaran Kegiatan	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	1
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	1
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	3
3.3. Akuntabilitas Keuangan.....	20
3.4. Predikat SAKIP Kabupaten/Kota.....	26
3.5. Hambatan dan Kendala.....	27
BAB IV PENUTUP	1

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2025 disusun sebagai bahan pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan program dan kegiatan oleh Bappeda Kota Banda Aceh pada Tahun 2025 dengan berorientasi pada hasil (outcome) yang ingin dicapai. LKjIP Bappeda Kota Banda Aceh mengacu pada Penetapan Kinerja (performance agreement) yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2025 untuk mencapai sasaran strategis (performance goal) Bappeda Kota Banda Aceh yaitu “Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif”. Untuk mengukur pencapaian sasaran strategis Bappeda Kota Banda Aceh tersebut, ditetapkanlah indikator sasaran strategis (performance indicator) yang kemudian ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kota Banda Aceh. Adapun Indikator sasaran strategis Bappeda Kota Banda Aceh terdiri dari 3 (tiga) indikator, yaitu:

1. Penjabaran konsistensi program RPD ke dalam RKPD.

Indikator ini di dukung oleh Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 100 persen.

2. Persentase Renja OPD yang selaras dengan RKPD

Indikator ini di dukung oleh Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 100 persen.

3. Persentase Implementasi rencana Kelitbangan

Indikator ini didukung oleh Program Penelitian dan Pengembangan Daerah. Capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 100 persen.

Rata-rata persentase realisasi terhadap target indikator sasaran pada tahun 2025 mencapai **100 persen**, yang berarti bahwa Skala Nilai Peringkat Kinerja Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2025 berada pada kriteria **Sangat Tinggi**.

Adapun sistematika penyajian LKjIP Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Cakupan LKjIP Kota Banda Aceh Tahun 2025 terdiri atas:

- a. Bab I Pendahuluan, terdiri dari:

1. Latar belakang;
2. Maksud dan tujuan;
3. Isu strategis;

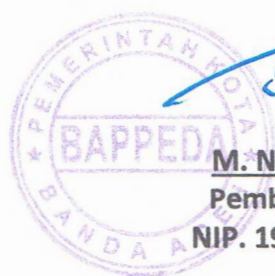
4. Gambaran Umum Organisasi; dan
 5. Dasar hukum.
- b. Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, terdiri dari:
1. Uraian singkat tujuan dan sasaran RPD Kota Banda Aceh periode 2023-2026 serta hubungannya dengan sasaran strategis Bappeda;
 2. Rencana Kerja, Program dan Kegiatan;
 3. Penetapan Kinerja; dan
 4. Penganggaran Kegiatan.
- c. Akuntabilitas Kinerja, terdiri dari:
1. Capaian Kinerja Organisasi;
 2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja;
 3. Akuntabilitas Keuangan; dan
 4. Keberhasilan dan Hambatan.

Realisasi kegiatan yang telah di laksanakan oleh Bappeda per 31 desember 2025 terserap sebesar Rp. 11.067.805.506,- atau 95,45 persen dari alokasi anggaran belanja Bappeda. Anggaran belanja yang tidak terealisasi sebesar Rp. 527.427.289,- atau 4,55 persen, disebabkan karena adanya selisih harga nego, tidak dilaksanakan lagi kegiatan karena tidak tersedianya Surat Penyediaan Dana (SPD) serta tidak dilakukan penarikan karena tidak ada kebutuhan lagi.

Keberhasilan dan kekurangan yang telah dicapai selama Tahun 2025 memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Bappeda Kota Banda Aceh untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh karena itu peningkatan kinerja tetap harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan kualitas pembangunan, sehingga sasaran strategis yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kota Banda Aceh periode Tahun 2023-2026 dapat terwujud.

Banda Aceh, 2 Februari 2026

¶ **Plt. Kepala Bappeda Kota Banda Aceh**



M. Nurdin, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196804201990111001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kota Banda Aceh tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.

LKjIP merupakan wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama setahun anggaran. Secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil. Hal yang paling utama untuk diinformasikan dalam LKjIP adalah yang mencakup capaian kinerja tahun berjalan yang merupakan perbandingan antara realisasi dengan rencana tahun tersebut.

Dengan disusunnya LKjIP Bappeda Kota Banda Aceh tahun 2025 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Bappeda Kota Banda Aceh;
2. Mendorong Bappeda Kota Banda Aceh di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Bappeda Kota Banda Aceh untuk meningkatkan kinerjanya.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LKjIP Bappeda Kota Banda Aceh adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Kota Banda Aceh selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKjIP Bappeda Kota Banda Aceh juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja Bappeda Kota Banda Aceh.

Penyusunan LKjIP Bappeda Kota Banda Aceh bertujuan untuk:

1. Menyajikan informasi kinerja berupa hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja Bappeda tahun 2025, termasuk menguraikan keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, permasalahan, serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil;
2. Menguraikan aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara anggaran daerah yang dibelanjakan pada tahun 2025 dengan hasil atau manfaat yang diperoleh (akuntabilitas keuangan); dan
3. Menguraikan secara singkat hubungan antara capaian pelaksanaan Renstra Bappeda periode tahun 2023-2026 melalui realisasasi pelaksanaan Renja tahun 2025, beserta sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2025 dan kaitannya dengan capaian tujuan yang hendak dicapai oleh Bappeda Kota Banda Aceh periode tahun 2023-2026, yaitu **terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif.**

1.3. Gambaran Umum Organisasi

1.3.1. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 36 Tahun 2022 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh, susunan organisasi Bappeda adalah sebagai berikut:

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Riset, Inovasi Daerah, Pengendalian Program dan Evaluasi; Bidang Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan;
 - d. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
 - e. Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda;
 - b. Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat/Daerah; dan

- c. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset.
- (3) Bidang Riset, Inovasi Daerah, Pengendalian Program dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari 3 (tiga) Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda.
- (4) Bidang Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari 3 (tiga) Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda.
- (5) Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari 3 (tiga) Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda.
- (6) Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari 3 (tiga) Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda.

1.3.2. Sumber Daya Manusia di Bappeda Kota Banda Aceh

Sumber daya aparatur merupakan salah satu faktor penunjang untuk peningkatan kinerja. Kondisi pegawai Bappeda Kota Banda Aceh 31 Desember 2025 sebanyak 67 orang, PNS sebanyak 48 orang, dan P3K sebanyak 19 orang. Klasifikasi Jumlah pegawai Bappeda berdasarkan jabatan dan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 1.1. dan tabel 1.2 berikut ini:

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan/Eselonering

Uraian	Jumlah
Kepala	1 Orang
Sekretaris	1 Orang
Kabid	4 Orang
Kasubbag	1 Orang
Fungsional Perencana	20 Orang
Analisis Keuangan Pusat/Daerah	1 Orang
Fungsional Umum	20 Orang
P3K	19 Orang

Sumber : Data Pegawai Bappeda Kota Banda Aceh 2025

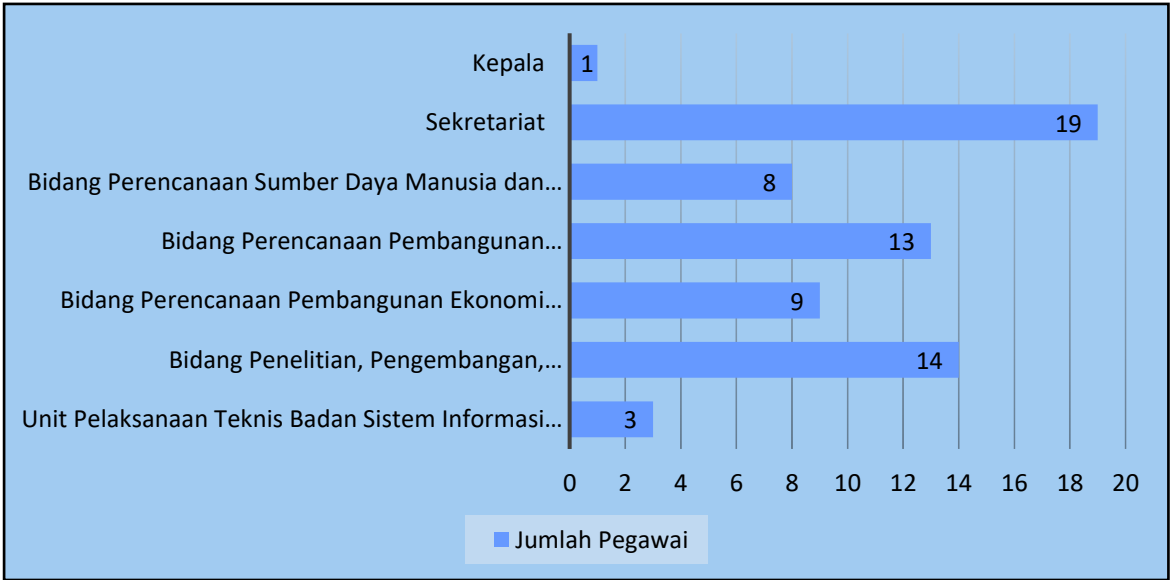
Tabel 1.2
Tingkat Pendidikan Pegawai Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2025

No	Tingkat	Jumlah (orang)
1	S3	1
2	S2	23
3	S1	34
4	Diploma/Sederajat	3
5	SMA/Sederajat	5
	SMP	1
	Jumlah	67

Sumber : Data Pegawai Bappeda Kota Banda Aceh 2025

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas diketahui bahwa Pegawai Bappeda Kota Banda Aceh terbanyak pada Strata 1 sebanyak 34 orang, diikuti oleh Strata 2 sebanyak 23 orang. Adapun sebaran jumlah pegawai Bappeda Kota Banda Aceh menurut bidang dapat dilihat pada Grafik 1.1 di bawah ini:

Grafik 1.1
Pegawai Bappeda Kota Banda Aceh Menurut Bidang Tahun 2025



Sumber: Data Pegawai Bappeda Kota Banda Aceh 2025

Untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang baik, BAPPEDA membutuhkan tenaga Fungsional Perencana Ahli pada setiap tingkatan. Berdasarkan Keputusan Wali Kota Banda Aceh Nomor 264 Tahun 2024 tentang Penetapan Formasi Jabatan Fungsional Perencana di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh, menunjukkan adanya kebutuhan Perencana Ahli Madya sebanyak 41 orang, Perencana Ahli Muda sebanyak 58 orang, dan Perencana Ahli Pertama 95 orang. Dengan rata-rata kebutuhan di masing-masing perangkat daerah sebanyak 3 orang. Hal ini sangat penting untuk mendukung tersusunnya

dokumen perencanaan pembangunan daerah maupun perencanaan pada level perangkat daerah.

BAPPEDA sendiri memiliki formasi Fungsional Perencana Ahli Madya sebanyak 15 orang, Perencana Ahli Muda sebanyak 24 orang, dan Perencana Ahli Pertama 32 orang. Hingga awal tahun 2025, tenaga fungsional perencana yang tersedia pada BAPPEDA adalah 1 orang Perencana Ahli Madya, 11 orang Perencana Ahli Muda, serta 8 orang Perencana Ahli Pertama. Selain Fungsional Perencana, BAPPEDA juga memiliki tenaga Fungsional Analis Keuangan Pusat/Daerah Ahli Muda sebanyak 1 orang yang bertugas mengelola internal keuangan BAPPEDA. Rincian formasi tenaga fungsional pada BAPPEDA Kota Banda Aceh terlihat pada Tabel berikut:

Tabel. 1.3
Formasi Fungsional pada BAPPEDA Kota Banda Aceh

No	Nama Jabatan Fungsional	Kelas Jabatan	Jumlah Kebutuhan	Jumlah Terpenuhi	Jumlah Kekurangan	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	Perencana Ahli Madya	12	15	1	14	
2	Perencana Ahli Muda	10	24	11	13	
3	Perencana Ahli Pertama	8	32	8	24	
4	Analis Keuangan Pusat/Daerah Ahli Muda	9	1	1	0	

Sumber: Subbagian Kepegawaian dan Aset, BAPPEDA, 2025

Selain tenaga Fungsional Perencana, BAPPEDA yang juga bertanggungjawab terhadap pengelolaan dan pengembangan riset dan inovasi daerah, tentunya membutuhkan dukungan tenaga Fungsional peneliti. Namun demikian hingga saat ini, Fungsional Peneliti pada BAPPEDA Kota Banda Aceh masih belum tersedia.

1.3.3. Sarana dan Prasarana

Dalam hal sarana dan prasarana untuk mendukung pencapaian kinerja Bappeda Kota Banda Aceh telah memiliki Aset seperti yang dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 1.4
Buku Inventaris

No	Uraian	Jumlah (Unit)	Nilai Aset (Rp)	Ket
1	2	3	4	5
1	Tanah	1	6.336.087.000	
2	Gedung dan Bangunan	4	3.546.148.000	
3	Peralatan dan Mesin	632	3.287.081.197	
4	Instalasi Solar Panel	2	123.601.000	
	TOTAL		13.292.917.197	

Sumber: Laporan Inventaris Aset BAPPEDA, 2025

1.4. Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan LKjIP Bappeda Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; dan
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2017 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah.

1.5. Permasalahan dan Isu Strategi

Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda sebagai lembaga teknis perencanaan pembangunan dan pengembangan penyelenggaraan pemerintah daerah, ada beberapa permasalahan utama yang menjadi Isu strategis (strategic issues) berdasarkan gambaran kondisi saat ini serta kondisi yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Adapun permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya koordinasi dengan dan antar OPD serta stakeholders terkait.
2. Keterbatasan ketersediaan data perencanaan pembangunan.
3. Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
4. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi hasil (*outcome*) pembangunan.
5. Minimnya penelitian dan inovasi daerah.

Penetapan isu strategis BAPPEDA ditentukan dengan mempertimbangkan gambaran pelayanan BAPPEDA, Visi dan Misi Kepala Daerah, serta uraian permasalahan. Berdasarkan hal tersebut teridentifikasi bahwa isu-isu terkait kualitas perencanaan serta peran serta riset dan inovasi daerah adalah sebagai berikut:

1. Penguatan koordinasi dan sinergitas perencanaan antar OPD dan stakeholder terkait lainnya.
2. Pemenuhan data yang berkualitas, terpusat dan terintegrasi.
3. Optimalisasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Indonesia Emas menjadi konsep atau tujuan akhir dalam perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJPN) Tahun 2025 – 2045 diurai menjadi 4 tahapan lima tahunan, yaitu:

- Tahap 1 (2025 – 2029): Penguatan Fondasi Transformasi;
- Tahap 2 (2030 – 2034): Akselerasi Transformasi;
- Tahap 3 (2035 – 2039): Ekspansi Global; dan
- Tahap 4 (2040 – 2045): Perwujudan Indonesia Emas.

Memasuki tahap pertama yang merupakan bagian dari perencanaan tingkat menengah (RPJMN), tahap penguatan fondasi transformasi tersebut diuraikan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di setiap tahunnya. Berikut adalah uraian tahapan penguatan fondasi transformasi di 5 tahun pertama upaya pencapaian Indonesia Emas:

1. RKP 2025 fokus pada: SDM dan Infrastruktur berkualitas.
2. RKP 2026 fokus pada: Inovasi dan Hilirisasi Industri Berkelanjutan.
3. RKP 2027 fokus pada: Percepatan Peletakan Fondasi Transformasi.
4. RKP 2028 fokus pada: Pemantapan Fondasi Transformasi.
5. RKP 2029 fokus pada: Perwujudan Fondasi Transformasi.

Adapun dalam kurun waktu 5 tahun tersebut, transformasi yang akan dilakukan fokus pada lima bidang, yaitu transformasi sosial; transformasi ekonomi; transformasi tata kelola; transformasi hukum; stabilitas; dan kepemimpinan Indonesia; serta transformasi sosial budaya dan ekologi. Kelima fokus tersebut menjadi landasan atau pegangan bagi daerah dalam menyusun dokumen perencanaan yang terintegrasi dengan pemerintah pusat. Dengan arah dan fokus yang terintegrasi antar pemerintah daerah, provinsi, maupun pemerintah pusat dapat menjadi kekuatan untuk mencapai target-target pembangunan di wilayah masing-masing.

2.2. Perencanaan Strategis

Pencapaian indikator kinerja utama merupakan keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan periode 2023-2026 yang telah direncanakan. Guna

mengukur keberhasilan tersebut, dibutuhkan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja utama daerah sekaligus merupakan penjabar yang menggambarkan kemajuan pembangunan Kota Banda Aceh. Indikator kinerja utama juga berfungsi sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pembangunan dimana publik dapat dengan mudah mengukur dan memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan kinerja pemerintah. Penetapan indikator kinerja utama juga merupakan bahan pengendalian dan evaluasi dampak kebijakan yang ditetapkan serta menjadi indikator laporan keberhasilan pembangunan dari pemerintah kepada publik.

Tujuan dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan program/kegiatan yang akan dilaksanakan Bappeda Kota Banda Aceh. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu atau tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

2.1.1 Tujuan

Tujuan yang akan dicapai oleh Bappeda Kota Banda Aceh tahun 2023-2026 adalah meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, aspiratif dan aplikatif.

2.1.2 Sasaran

Sasaran yang berkaitan dengan tupoksi Bappeda Kota Banda Aceh adalah terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif.

Tujuan dan sasaran jangka menengah kemudian diuraikan dalam pohon kinerja sasaran sehingga seluruh rencana program dan kegiatan Bappeda yang akan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran tersebut dapat tergambar secara sistematis.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Kota Banda Aceh

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				
		Kondisi Awal (2022)	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir (2026)
1	2	3	4	5	6	7	8
Tujuan: (1) Meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, aspiratif dan aplikatif Sasaran: (1.1) Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif	Persentase OPD yang dokumen perencanaannya selaras dengan dokumen perencanaan kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	1.1.1 Penjabaran Konsistensi Program RPD kedalam RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	1.1.2 Persentase Renja OPD yang selaras dengan RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	1.1.3 Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tujuan RPD : Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah

Sasaran RPD : Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah

IKU RPD : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Tujuan OPD : Meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, aspiratif dan aplikatif

Sasaran OPD : Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif

Tabel 2.2
Pohon Kinerja Sasaran

INDIKATOR SASARAN	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD								
PROGRAM	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah								
KEGIATAN	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan					Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Implementasi sistem informasi pemerintahan daerah di bidang pembangunan daerah
SUB KEGIATAN	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/ Kota	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah

INDIKATOR SASARAN	Persentase Renja OPD yang selaras dengan RKPd								
PROGRAM	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah								
KEGIATAN	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
SUB KEGIATAN	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang perekonomian	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
INDIKATOR SASARAN	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan								
PROGRAM	Penelitian dan Pengembangan Daerah								
KEGIATAN	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan						Pengembangan Inovasi dan Teknologi	
SUB KEGIATAN	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan perdagangan	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasa di Bidang Teknologi dan Inovasi

Sumber: Renstra Bappeda 2023-2026

2.1 Rencana Kerja, Program, dan Kegiatan Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2025

Pelaksanaan program kerja Bappeda tahun 2025 berpedoman pada program kerja yang tertuang dalam rencana strategis BAPPEDA periode 2023-2026. Meskipun rata-rata jenis program dan kegiatan BAPPEDA adalah sama disetiap tahunnya, namun terdapat beberapa perbedaan seperti nilai target kinerja serta jenis penelitian yang dilaksanakan. Kegiatan yang menjadi core business BAPPEDA seperti pelaksanaan proses musrenbang dan penyusunan dokumen perencanaan daerah, serta kegiatan asistensi dan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan OPD diperkirakan sama disetiap tahunnya. Namun demikian keberadaan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan ini tentunya dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran dan kondisi keuangan daerah disetiap tahunnya.

Sesuai Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 36 Tahun 2022 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, BAPPEDA melaksanakan tugas pada dua bidang urusan yaitu Urusan Perencanaan dan Urusan Riset dan Inovasi Daerah. Untuk itu dalam pelaksanaan tugasnya, program kerja BAPPEDA dipisahkan ke dalam dua kelompok urusan tersebut. Secara keseluruhan, ditahun 2025 terdapat 4 program.

Berikut adalah rincian uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada BAPPEDA Kota Banda Aceh di Tahun 2025, berdasarkan bidang urusan.

A. URUSAN PENUNJANG

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Program ini merupakan program yang mendukung kelancaran operasional BAPPEDA. Program ini memastikan bahwa seluruh urusan di BAPPEDA Kota Banda Aceh di tahun 2025 dapat berjalan dengan baik. Pada program penunjang inilah diidentifikasi seluruh kebutuhan dasar organisasi seperti kebutuhan gaji dan administrasi pendukung, kebutuhan listrik, air, alat dan sarana komunikasi, kendaraan dinas, serta peralatan modal lainnya. Tanpa program penunjang, roda organisasi dapat terhambat dan terkendala pelaksanaannya.

Seluruh kegiatan dan Sub kegiatan pada BAPPEDA Kota Banda Aceh yang mendukung program penunjang di tahun 2025, adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
 - b. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
4. Kegiatan Administrasi Perangkat Daerah.
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 - b. Sub Kegiatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan.
 - e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 - f. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel.
 - g. Sub Kegiatan Peralatan dan Mesin Lainnya.
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik.

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya.

B. URUSAN PERENCANAAN

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Program ini berisikan kegiatan utama Bappeda termasuk di dalamnya adalah pelaksanaan Konsultasi Publik, Musrenbang, Forum Perangkat Daerah, penyusunan dokumen perencanaan daerah, analisis data perencanaan, hingga pelaksanaan pengendalian, monitoring, dan evaluasi pembangunan daerah. Program ini menjadi penentu utama keberhasilan perencanaan pembangunan daerah sehingga menjadi salah satu program prioritas Bappeda yang wajib dilaksanakan disetiap tahunnya.

Berikut adalah rincian kegiatan dan sub kegiatan terkait program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah di tahun 2025.

- 1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan.
 - 1.1. Sub Kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya.
 - 1.2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik.
 - 1.3. Sub Kegiatan Koordinasi Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.
 - 1.4. Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota.

- 1.5. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - 2.1 Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - 3.1 Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah.
4. Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dibidang Pembangunan Daerah.
 - 4.1 Sub Kegiatan Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah.

2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Selain mengelola proses perencanaan pembangunan kota, Bappeda juga bertugas melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan perencanaan pembangunan khususnya antar perangkat daerah. Untuk memastikan seluruh perencanaan OPD sejalan dan selaras dengan perencanaan kota, Bappeda juga melakukan pendampingan dan asistensi penyusunan dokumen perencanaan OPD. Sinkronisasi juga dilakukan dengan pihak provinsi dan pemerintah pusat, khususnya terhadap perencanaan pembangunan kota yang didanai oleh sumber pendanaan lainnya seperti APBA maupun APBN.

Kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung program tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

- 1.1 Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan.
 - 1.2 Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia.
 - 1.3 Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia.
2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam).
 - 2.1 Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian.
 - 2.2 Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian.
 - 2.3 Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA.
3. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
 - 3.1. Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur.
 - 3.2. Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur.
 - 3.3. Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan.

C. URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Melaksanakan penelitian merupakan salah satu fungsi Bappeda Kota Banda Aceh. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran

akan kondisi riil berbagai permasalahan maupun potensi yang ada di Kota Banda Aceh. Dengan demikian akan lebih banyak masukan dan dasar yang akurat bagi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan di Kota Banda Aceh. Berikut adalah kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung program penelitian dan pengembangan daerah di tahun 2025:

1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan.
 - 1.1 Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial.
2. Kegiatan Penelitian Penelitian dan Pengembangan Bidang ekonomi dan pembangunan.
 - 2.1 Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
 - 2.2 Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup.
3. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.
 - 3.1 Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi.
 - 3.2 Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan.

Secara menyeluruh, seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan di tahun 2025 lengkap dengan indikator dan targetnya, tergambar dalam Tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahunan Bappeda Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	
1	2	3	4	5	
		1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100	Persen
		1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi OPD yang tersusun	100	Persen
		1.1.1 Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	5	Dokumen
		1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	100	Persen
		1.2.1 Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45	Orang/bulan
		1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100	Persen

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	
1	2	3	4	5	
		1.3.1 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	1	Paket
		1.3.2 Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	10	Orang
		1.3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi umum	100	Persen
		1.3.1 Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1	Paket
		1.3.2 Sub Kegiatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	8	Paket
		1.3.3 Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Logistik kantor yang disediakan	1	Paket
		1.3.4 Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1	Paket

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	
1	2	3	4	5	
		1.3.5 Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	Laporan
		1.4 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100	Persen
		1.4.1 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	2	Unit
		1.4.2 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	67	Unit
		1.5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen
		1.5.1 Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1	Laporan
		1.5.2 Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1	Laporan

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	
1	2	3	4	5	
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen
		1.6.1 Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	11	Unit
		1.6.2 Sub kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	114	Unit
		1.6.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Laiinya	Jumlah gedung kantor dan bangunan laiinya yang dipelihara/direhabilitasi	1	Unit
Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif	1. Penjabaran Konsistensi Program RPD kedalam RKPD	2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase kegiatan pembangunan daerah yang terlaksana sesuai dokumen perencanaan	100	Persen
		2.1 Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen perencanaan daerah	100	Persen
		2.1.1 Sub kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen	Jumlah telaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya	1	Dokumen

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	
1	2	3	4	5	
		Kebijakan Lainnya			
		2.1.2 Sub kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1	Berita acara
		2.1.3 Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	20	Berita acara
		2.1.4 Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kab/Kota	1	Berita acara
		2.1.5 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	4	Dokumen
		2.2 Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan data dan informasi pendukung perencanaan pembangunan daerah	100	Persen
		2.2.1 Sub kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	2	Dokumen

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	
1	2	3	4	5	
		2.3 Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan daerah	100	Persen
		2.3.1 Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2	Laporan
		2.4 Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dibidang Pembangunan Daerah	100	Persen
		2.4.1 Sub kegiatan Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data Dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	3	Dokumen
	2. Persentase Renja OPD yang selaras dengan RKPD	3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah yang sinkron dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	100	Persen
		3.1 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang selaras dengan perencanaan daerah	100	Persen

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	
1	2	3	4	5	
		3.1.1 Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2	Laporan
		3.1.2 Sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	15	Laporan
		3.1.3 Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1	Laporan
		3.2 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA yang selaras dengan perencanaan daerah	100	Persen
		3.2.1 Sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	18	Laporan

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	
1	2	3	4	5	
		Daerah Bidang Perekonomian			
		3.2.2 Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1	Laporan
		3.2.3 Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1	Laporan
		3.3 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan yang selaras dengan perencanaan daerah	100	Persen
		3.3.1 Sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	11	Laporan
		3.3.2 Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	6	Laporan

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	
1	2	3	4	5	
		Bidang Infrastruktur			
		3.3.3 Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	5	Laporan
	3. Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase dokumen perencanaan daerah yang didasarkan pada hasil analisa penelitian dan pengembangan	100	Persen
4.1 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	100	Persen	
4.1.1 Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1	Dokumen	
4.2 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang ekonomi dan pembangunan		Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	100	Persen	
4.2.1 Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah	1	Dokumen	

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	
1	2	3	4	5	
		4.2.2 Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1	Dokumen
		4.3 Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi	100	Persen
		4.3.1 Sub kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	2	Dokumen
		4.3.2 Sub Kegiatan Sosialisasi dan Deseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan sosialisasi dan desiminasi hasil-hasil kelitbangan	2	Laporan

3.1. Perjanjian Kinerja

Keberhasilan BAPPEDA terlihat dari indikator dan target kinerja yang terukur, baik secara tahunan maupun secara jangka menengah dan jangka panjang. Dokumen RKT memaparkan seluruh kinerja BAPPEDA selama satu tahun. Seluruh indikator dan target kinerja BAPPEDA tahun 2025 ditetapkan dengan rumusan yang dapat diukur. Dengan demikian diharapkan seluruh rencana kerja tahunan BAPPEDA dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien.

Untuk memudahkan pencapaian target kinerja perlu disusun suatu Penetapan Kinerja, yang merupakan kesepakatan atau perjanjian kinerja antara pimpinan instansi pemerintahan dengan pihak yang memberikan amanah atau tanggungjawab. Kepala Bappeda Kota Banda Aceh dalam hal ini memiliki kesepakatan atau perjanjian kinerja dengan Walikota Banda Aceh sebagai kepala daerah yang memberikan amanah bagi pengelolaan proses perencanaan pembangunan daerah. Kesepakatan tersebut tergambar dari rumusan indikator sasaran strategis Bappeda Banda Aceh yang target pencapaiannya diukur disetiap tahunnya termasuk di tahun 2025.

Tabel 2.4. berikut adalah perjanjian kinerja Kepala Bappeda Kota Banda Aceh dengan Walikota Banda Aceh di tahun 2025.

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja BAPPEDA Kota Banda Aceh Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif	1.1	Penjabaran Konsistensi Program RPD kedalam RKPD	100%
		1.2	Persentase Renja OPD yang selaras dengan RKPD	100%
		1.3	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	100%

BAPPEDA Kota Banda Aceh menetapkan 3 (tiga) indikator kinerja dalam Renstra Tahun 2023–2026 yang mendukung pencapaian sasaran strategis yaitu Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif. Ketiga indikator tersebut seperti tertuang dalam tabel 2.4 memiliki target pencapaian 100 % di tahun 2025.

Berikut adalah gambaran rencana kebutuhan anggaran bagi pembiayaan seluruh program strategis maupun penunjang Bappeda Banda Aceh di tahun 2025.

Tabel 2.5
Alokasi Anggaran Bappeda Kota Banda Aceh per Program Tahun 2025

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.738.773.411
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.439.676.600
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	705.674.100
4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	686.202.500
JUMLAH ANGGARAN		12.570.324.611

Total alokasi anggaran sebelum perubahan yang mendukung pencapaian kinerja BAPPEDA Kota Banda Aceh tahun 2025 adalah sebesar 12.570.324.611 Rupiah. Anggaran tersebut sebesar Rp 11.960.271.411 dipergunakan untuk belanja operasi (belanja pegawai, belanja barang dan jasa) dan sisa anggaran sebesar Rp 610.053.200 dipergunakan untuk belanja modal. Ketersediaan anggaran merupakan hal yang cukup menentukan bagi BAPPEDA dalam menentukan kesuksesan pencapaian target-target perencanaan pembangunan daerah di Kota Banda Aceh.

2.2 Penganggaran Kegiatan

Pada Tahun Anggaran 2025 Bappeda Kota Banda Aceh melaksanakan Program/kegiatan dengan rincian anggaran seperti dijelaskan pada Tabel 2.6 berikut:

Tabel 2.6
Penganggaran Kegiatan Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Anggaran sebelum perubahan (Rp)	Anggaran setelah perubahan (Rp)
		1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	9.738.771.411	9.408.909.095
			1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Bappeda yang tersusun	66.782.000	35.268.200
				1.1.1	Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	66.782.000	35.268.200
			1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan administrasi keuangan	6.419.692.111	6.947.496.490
				1.2.1	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	6.419.692.111	6.947.496.490
				1.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Kepegawaian Perangkat Daerah	135.750.000
				1.3.1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	35.750.000	0

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Anggaran sebelum perubahan (Rp)	Anggaran setelah perubahan (Rp)
				1.3.2	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100.000.000	0
			1.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi umum	365.763.600	350.019.705
				1.3.1	Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	3.454.700	3.454.700
				1.3.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	83.285.100	82.855.200
				1.3.3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis Komponen Peralatan Bahan Logistik Kantor yang disediakan	52.927.100	19.662.300
				1.3.4	Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	26.096.700	23.502.800
				1.3.4	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	200.000.000	220.544.705
			1.4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	635.753.200	253.318.800
				1.4.1	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah unit mebel lainnya yang disediakan	6.876.000	0

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Anggaran sebelum perubahan (Rp)	Anggaran setelah perubahan (Rp)
				1.4.2	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	628.877.200	253.318.800
			1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.441.560.000	1.286.460.000
				1.5.1	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	401.000.000	401.000.000
				1.5.2	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.040.560.000	885.460.000
			1.6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	673.470.500	536.345.900
				1.6.1	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Pemeliharaan dan Pembayaran Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	380.528.000	400.036.300
				1.6.2	Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	48.102.500	108.066.000
				1.6.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	244.840.000	28.243.600

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Anggaran sebelum perubahan (Rp)	Anggaran setelah perubahan (Rp)
Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif	Persentase keselarasan Program RKPD terhadap RPJMD	2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah			Persentase kegiatan pembangunan daerah yang terlaksana sesuai dokumen perencanaan	1.439.676.600	2.088.759.290
		2.1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen perencanaan daerah	1.219.484.000	1.487.919.000
			2.1.1	Sub kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya		Jumlah jenis usulan program dan kegiatan daerah yang didanai oleh Sumber-sumber dana lainnya	85.020.000	7.330.000
			2.1.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik		Jumlah berita acara konsultasi publik	115.330.300	53.388.200
			2.1.3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah		Jumlah berita acara forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah	79.582.100	11.070.600
			2.1.4	Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota		Jumlah peserta yang mengikuti Musrenbang	217.583.400	134.229.400
			2.1.5	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen RKPD yang tersusun	721.968.800	1.281.901.400

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Anggaran sebelum perubahan (Rp)	Anggaran setelah perubahan (Rp)
			2.2	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan data dan informasi pendukung perencanaan pembangunan daerah	100.587.500	28.385.000
				2.2.1	Sub kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah jenis data perencanaan dan aplikasi yang dikelola	100.587.500	28.385.000
			2.3	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan daerah	94.522.200	26.142.200
				2.3.1	Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	94.522.200	26.142.200
			2.4	Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah		Persentase kegiatan pembangunan daerah yang terlaksana sesuai dengan dokumen perencanaan	25.082.300	25.082.300
				2.4.1	Sub Kegiatan Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah data dalam system informasi pemerintahan daerah di bidang pembangunan daerah yang dikelola	25.082.300	25.082.300

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Anggaran sebelum perubahan (Rp)	Anggaran setelah perubahan (Rp)	
	Persentase Renja OPD selaras dengan RKPD	3.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah yang sinkron dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	705.674.100	458.134.100	
			3.1	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Persentase dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang selaras dengan perencanaan daerah	189.093.000	122.598.400
				3.1.1	Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	43.416.000	44.795.400
				3.1.2	Sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang pemerintahan yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah	122.662.500	71.820.000
				3.1.3	Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang pembangunan manusia yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah	23.014.500	5.983.000
			3.2	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Persentase dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA yang selaras dengan perencanaan daerah	241.353.600	174.509.600

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Anggaran sebelum perubahan (Rp)	Anggaran setelah perubahan (Rp)
				3.2.1	Sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang perekonomian yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah	104.829.900	58.370.000
				3.2.2	Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan daerah kota Banda Aceh	118.311.100	104.039.600
				3.2.3	Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang SDA yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah	18.212.600	12.100.000
			3.3	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Persentase dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan yang selaras dengan perencanaan daerah	275.227.500	161.026.100
				3.3.1	Sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang infrastruktur yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah	96.100.000	74.547.600

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Anggaran sebelum perubahan (Rp)	Anggaran setelah perubahan (Rp)
				3.3.2	Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional bidang infrastruktur	73.670.000	24.095.000
				3.3.3	Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang kewilayahan yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah	105.457.500	62.383.500
	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	4.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah			Persentase dokumen perencanaan daerah yang didasarkan pada hasil analisa penelitian dan pengembangan	686.202.500	160.660.500
			4.1	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Tersedianya dokumen penelitian pengembangan bidang sosial dan kependudukan	126.573.800	0
				4.1.1	Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial	126.573.800	0
			4.2	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang ekonomi dan pembangunan		Tersedianya dokumen penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	364.276.000	32.780.500

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Anggaran sebelum perubahan (Rp)	Anggaran setelah perubahan (Rp)
				4.2.1	Sub kegiatan Penelitian dan pengembangan Koperasi, usaha kecil dan menengah	Jumlah laporan survey pengembangan Koperasi, usaha kecil dan menengah	157.030.500	0
				4.2.2	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah laporan survey Lingkungan Hidup	207.245.500	32.780.500
			4.3	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Tersedianya dokumen pengembangan inovasi dan teknologi	195.352.700	127.880.000
				4.3.1	Sub kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah laporan penelitian dibidang teknologi dan informasi	139.712.000	127.880.000
				4.3.2	Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah laporan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	55.640.700	0

Sumber: DPPA Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2025

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan tujuan, sasaran, organisasi seperti yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Untuk menentukan tingkat capaian kinerja tersebut dibutuhkan suatu pengukuran kinerja.

Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai, dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2025, dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi capaian indikator kinerja, sehingga terlihat apakah target yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Penilaian dilakukan dengan memberikan peringkat capaian kinerja sesuai dengan Skala Nilai Peringkat Kinerja seperti dijelaskan pada Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah
Sumber: Lampiran VII-C Permendagri Nomor 54 Tahun 2010		

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

- (1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
- (2) Hasil Sedang Cukup menunjukkan pencapaian atau realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
- (3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah menunjukkan pencapaian atau realisasi kinerja capaian belum memenuhi atau masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Indikator kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan dari sasaran strategis Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Sasaran Strategis Bappeda Tahun 2025

SASARAN	INDIKATOR SASARAN		PROGRAM	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN 2025 (%)	REALISASI KINERJA SASARAN TAHUN 2025 (%)	CAPAIAN TAHUN 2025 (%)
1	2		3	4	5	6
Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif	1	Penjabaran Kosistensi Program RPD kedalam RKPD	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100	100	100
	2	Persentase Renja OPD yang selaras dengan RKPD	Program koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100	100	100
	3	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	100	100	100
Rata-Rata Persentase Realisasi						100

Berdasarkan Tabel 3.2 diatas terdapat 1 (satu) sasaran strategis yang terbagi dalam 3 (tiga) indikator sasaran strategis, maka jika dilihat dari Tabel 3.2 rata-rata persentase realisasi terhadap target indikator sasaran pada tahun 2025 mencapai **100 persen**, yang

berarti bahwa Skala Nilai Peringkat Kinerja Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2025 berada pada kriteria **Sangat Tinggi**.

Bappeda tidak memiliki indikator yang diatur sesuai SPM/standar nasional. Indikator kinerja Bappeda kota Banda Aceh sesuai Renstra Bappeda tahun 2023-2026, diukur dari tiga (3) indikator.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Capaian Kinerja Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2025 diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026. Mengacu pada Renstra tersebut, kemudian difokuskan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026.

Perbandingan capaian kinerja Bappeda terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2023-2026 dijelaskan dalam Tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Renstra 2023-2026

SASARAN	INDIKATOR SASARAN		Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Pencapaian			Proyeksi
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2026
1	2		3	4	5	6	7	8	9
Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif	1	Persentase keselarasan Program RKPD terhadap RPJMD	100	100	100	100	100	100	100
	2	Persentase OPD yang Renjanya selaras dengan RKPD	100	100	100	100	100	100	100
	3	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	100	100	100	10	27,78	100	100

Capaian Kinerja Bappeda Kota Banda Aceh pada tahun 2023 s.d 2025 dilihat dari IKU pencapaian Indikator kinerja **Penjabaran Konsistensi Program RPD kedalam RKPD** dicapai sebesar 100 persen, dimana program, kegiatan dan pendanaan disusun seluruhnya berdasarkan dokumen RPJMD.

Indikator kinerja **Persentase Renja OPD yang selaras dengan RKPD** dicapai sebesar 100 persen, dengan dilaksanakannya kegiatan koordinasi dan asistensi penyusunan Renja OPD di setiap proses penyusunan dokumen Renja OPD. Pencapaian ini menunjukkan bahwa fungsi Bappeda dalam hal pembinaan, dan pengawasan di bidang perencanaan pembangunan daerah bisa dikatakan berhasil. Berhasilnya Bappeda dalam menjalankan fungsi tersebut menghasilkan konsistensi dan integrasi yang jelas antar dokumen perencanaan baik dokumen perencanaan Daerah (RPD, RKPD) maupun dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja). Selain itu dengan terjaganya konsistensi dan integrasi antar dokumen perencanaan tersebut maka keberhasilan pencapaian target kinerja salah satu dokumen perencanaan secara otomatis akan berkontribusi secara nyata terhadap dokumen perencanaan di atasnya. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa keberhasilan Bappeda dalam mencapai target kinerja tahunan (Renja/RKT) tahun 2025 telah mengungkit tercapainya sasaran Renstra Bappeda 2023-2026 dan sasaran RPD Kota Banda Aceh Tahun 2025, yang kemudian mengungkit pencapaian kinerja Sasaran RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026.

Terkait bidang urusan penelitian, dengan indikator kinerja **Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan** pada Tahun 2023 hanya dicapai sebesar 10% dan pada tahun 2024 sebesar 27,78% hal ini disebabkan karena adanya efisiensi dan rasionalisasi anggaran sehingga tidak memungkinkan dilaksanakannya kegiatan penelitian, sedangkan pada tahun 2025 mencapai sebesar 100% dengan disusunnya penelitian terkait Pengurangan Risiko Bencana Melalui Optimalisasi Fungsi Masjid Sebagai Tempat Evakuasi Tsunami.

Capaian Sasaran Strategis dan Realisasi Anggaran Kegiatan tahun 2025 pada tabel 3.4 berikut ini:

Tabel 3.4
Capaian Sasaran Strategis dan Realisasi Anggaran Kegiatan tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realsasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja (%)	Anggaran setelah perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (Rp)
		1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	9.408.909.095	9.336.763.458	99.23 %
			1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Bappeda yang tersusun	100 %	100 %	100 %	35.268.200	25.102.200	71.18 %
				1.1.1	Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	13 Dokumen	13 Dokumen	100%	20.552.000	15.212.000	71.18 %
			1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan administrasi keuangan	100 %	100 %	100 %	6.947.496.490	7.420.355.086	106.81 %
				1.2.1	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	46 Orang	46 Orang	100 %	6.947.496.490	7.420.355.086	106,81 %
			1.3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang	100 %	100 %	100 %	350.019.705	286.956.386	81,98 %

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realsasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja (%)	Anggaran setelah perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (Rp)
						administrasi umum						
				1.3.1	Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100 %	3.454.700	659.800	19.10 %
				1.3.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	8 Paket	8 Paket	100 %	82.855.200	77.488.600	93.52 %
				1.3.3	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	8 paket	8 Paket	100 %	19.662.300	15.698.600	79.84 %
				1.3.4	Sub Kegiatan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	8 paket	8 paket	100 %	23.502.800	20.868.300	88.79 %
				1.3.5	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasidan Konsultasi SKPD	10 Laporan	10 Laporan	100 %	220.544.705	172.241.686	78.10 %
			1.4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang	100 %	100 %	63.54 %	253.318.800	160.969.600	63.54 %

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realsasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja (%)	Anggaran setelah perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (Rp)	
				Pemerintahan Daerah		perangkat daerah						
				1.4.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	16 Unit	16 Unit	100 %	253.318.800	160.969.000	63.54 %
			1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	1.286.460.000	1.028.836.786	79.97 %
				1.5.1	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	12 Laporan	12 Laporan	100 %	400.036.300	285.470.800	52.66 %
				1.5.2	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	100 %	885.460.000	817.681.950	92.35 %
			1.6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	536.345.900	414.543.400	77.29 %

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realsasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja (%)	Anggaran setelah perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (Rp)
				1.6.1	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Pemeliharaan dan Pembayaran Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	11 Unit	11 Unit	100 %	400.036.300	285.470.800	71.36 %
				1.6.2	Sub kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	95 Unit	95 Unit	100 %	108.066.000	100.829.000	93.30 %
				1.6.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	1 unit	100 %	28.243.600	28.243.600	100 %
Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif	Persentase keselarasan Program RKPD terhadap RPJMD	2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah			Persentase kegiatan pembangunan daerah yang terlaksana sesuai dokumen perencanaan	100 %	100 %	100 %	1.567.529.100	1.396.088.048	89.06 %
			2.1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen perencanaan daerah	100 %	100 %	100 %	1.487.919.600	1.358.748.048	91.32 %
				2.1.1	Sub kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah jenis usulan program dan kegiatan daerah yang didanai oleh Sumber-sumber	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	7.330.000	830.000	11.32 %

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realsasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja (%)	Anggaran setelah perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (Rp)
					dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	dana lainnya						
				2.1.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah berita acara konsultasi publik	2 Berita Acara	2 Berita Acara	100 %	53.388.200	41.638.700	77.99 %
				2.1.3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah berita acara forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah	20 Berita Acara	20 Berita Acara	100 %	11.070.600	9.682.100	87.46 %
				2.1.4	Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota	Jumlah peserta yang mengikuti Musrenbang	5 Berita Acara	5 Berita Acara	100 %	134.229.400	129.126.800	96.20 %
				2.1.5	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RKPD yang tersusun	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	1.281.901.400	1.177.470.448	91.85 %
			2.2	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan data dan informasi pendukung perencanaan pembangunan daerah	100 %	100 %	100 %	28.385.000	28.385.000	100.00 %

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realsasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja (%)	Anggaran setelah perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (Rp)
				2.2.1	Sub kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah jenis data perencanaan dan aplikasi yang dikelola	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	28.385.000	28.385.000	100.00 %
			2.3	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan daerah	100 %	100 %	100%	26.142.200	0	0%
				2.3.1	Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100 %	26.142.200	0	0%
			2.4	Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah		Persentase kegiatan pembangunan daerah yang terlaksana sesuai dengan dokumen perencanaan	100 %	100 %	100 %	25.085.300	8.955.000	35.70 %
				2.4.1	Sub Kegiatan Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan	Jumlah data dalam sistem informasi pemerintahan daerah di bidang pembangunan daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	25.085.300	8.955.000	35.70 %

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realsasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja (%)	Anggaran setelah perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (Rp)
	Persentase Renja OPD selaras dengan RKPD				Daerah	yang dikelola						
		3.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah			Persentase dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah yang sinkron dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	100 %	100 %	100 %	458.134.100	187.866.500	41.01 %
			3.1	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Persentase dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang selaras dengan perencanaan daerah	100 %	100 %	100 %	122.598.000	69.795.000	56.93 %
				3.1.1	Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Pembangunan Perangkat Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2 Laporan	2 Laporan	100 %	44.795.400	38.275.400	85.44 %
				3.1.2	Sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang pemerintahan yang sesuai dengan	15 Laporan	15 Laporan	100 %	71.820.000	30.690.000	42.73 %

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realsasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja (%)	Anggaran setelah perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (Rp)
					Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	dokumen perencanaan daerah						
				3.1.3	Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang pembangunan manusia yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah	2 Laporan	2 Laporan	100 %	5.983.000	830.000	13.87 %
			3.2	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Persentase dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA yang selaras dengan perencanaan daerah	100 %	100 %	100 %	174.509.600	63.737.500	36.52 %
				3.2.1	Sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang perekonomian yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah	18 Laporan	18 Laporan	100 %	58.370.000	26.555.000	45.49 %
				3.2.2	Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan daerah kota Banda Aceh	1 Laporan	1 Laporan	100 %	104.039.600	37.182.500	35.74 %

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realsasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja (%)	Anggaran setelah perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (Rp)
				3.2.3	Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang SDA yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah	-	-	0 %	12.100.000	0	0 %
			3.3	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Persentase dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan yang selaras dengan perencanaan daerah	100 %	100 %	100 %	161.026.100	54.333.600	33.74 %
				3.3.1	Sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang infrastruktur yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah	11 Laporan	11 Laporan	100 %	74.547.600	32.787.600	43.98 %
				3.3.2	Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional	7 Laporan	7 Laporan	100 %	24.095.000	17.745.000	73.65 %

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realsasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja (%)	Anggaran setelah perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (Rp)
						bidang infrastruktur						
				3.3.3	Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan SInergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang kewilayahan yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah	6 Laporan	6 Laporan	100 %	62.383.500	3.801.000	6.09 %
	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	4.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah			Persentase dokumen perencanaan daerah yang didasarkan pada hasil analisa penelitian dan pengembangan	100 %	100 %	100 %	160.660.500	147.087.500	91.55 %
			4.1	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang ekonomi dan pembangunan		Tersedianya dokumen penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	100 %	100 %	100 %	32.780.500	22.087.500	67.38 %
				4.1.1	Sub kegiatan Penelitian dan pengembangan Koperasi, usaha kecil dan menengah	Jumlah laporan survey pengembangan Koperasi, usaha kecil dan menengah	-	-	-	-	-	0 %
				4.1.2	Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan	Jumlah laporan penelitian bidang	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	32.780.500	22.087.500	67.38 %

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realsasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja (%)	Anggaran setelah perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (Rp)
					Lingkungan Hidup	lingkungan hidup						
			4.2	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Tersedianya dokumen pengembangan inovasi dan teknologi	100 %	100 %	100 %	127.880.000	125.000.000	97.75 %
				4.2.1	Sub kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah laporan penelitian dibidang teknologi dan informasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	127.880.000	125.000.000	97.75 %
				4.2.2	Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	-	-	-	-	-	-
JUMLAH TOTAL										11..595.232.795	11.067.805.506	95.45 %

Berdasarkan Tabel 3.4 di atas Bappeda Kota Banda Aceh memiliki 1 (satu) sasaran strategis yaitu Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif dan terdapat 3 (tiga) indikator sasaran (IKU), yaitu:

1. Penjabaran konsistensi program RPD ke dalam RKPD.

Indikator kinerja ini di dukung oleh Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 100 persen.

Penjabaran konsistensi program dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan merupakan proses krusial dalam perencanaan pembangunan daerah. Langkah-langkah ini bertujuan menjamin keterkaitan, ketaatan, dan sinergi kebijakan.

Berikut adalah langkah-langkah yang ditempuh Bappeda untuk menjabarkan konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD:

1. Tahap Persiapan dan Analisis Awal

- Identifikasi Program Prioritas RPJMD: Menginventarisasi program-program strategis yang tertuang dalam RPJMD periode lima tahunan yang harus dilaksanakan pada tahun rencana.
- Evaluasi Pelaksanaan Tahun Lalu (Review Renja/RKPD sebelumnya): Melakukan analisis terhadap capaian kinerja tahun sebelumnya untuk melihat konsistensi program dan kegiatan, serta mengidentifikasi hambatan.
- Analisis Pagu Indikatif: Menetapkan pagu indikatif bagi SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sebagai acuan besaran anggaran yang tersedia, memastikan program realistis.

2. Tahap Penyusunan Rancangan (Penyelarasan & Sinkronisasi)

- Penyelarasan Nomenklatur dan Sasaran: Memastikan nomenklatur program, kegiatan, dan sub-kegiatan dalam RKPD sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (permendagri/perda).
- Sinkronisasi dengan Kebijakan Nasional/Provinsi: Menyelaraskan prioritas daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional dan program prioritas Provinsi.
- Forum Konsultasi Publik & Forum PD: Mengakomodir hasil Musrenbang, pokok-pokok pikiran DPRD, dan forum Perangkat Daerah untuk menjamin partisipasi masyarakat dalam program.

3. Tahap Pembahasan dan Penetapan (Validasi)

- Verifikasi Rancangan Akhir RKPD (Bappeda): Bappeda melakukan verifikasi/penelaahan atas rancangan akhir RKPD untuk memastikan program perangkat daerah telah diakomodir.
- Matriks Konsistensi (Penjabaran): Menyusun matriks konsistensi antara program/kegiatan di RPJMD dengan yang dituangkan di RKPD untuk menghitung persentase kesesuaian.
- Penetapan RKPD: Menetapkan dokumen akhir RKPD sebagai landasan penyusunan APBD.

4. Aspek Pengukuran Konsistensi (Teknis)

Konsistensi diukur melalui dua aspek utama:

1. Konsistensi Nomenklatur: Kesesuaian nama program/kegiatan antara dokumen perencanaan dan anggaran.
2. Konsistensi Anggaran (Pagu): Kesesuaian alokasi anggaran yang direncanakan dengan pagu indikatif.

2. *Persentase Renja OPD yang selaras dengan RKPD*

Indikator ini di dukung oleh Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 100 persen,

Mewujudkan persentase Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memerlukan pendekatan sistematis, berbasis kinerja, dan terdokumentasi dalam *e-planning* (SIPD). Renja OPD adalah penjabaran tahunan dari Renstra OPD yang harus mengacu pada kebijakan pembangunan daerah.

Berikut adalah langkah-langkah sistematis untuk menyelaraskan Renja OPD dengan RKPD:

1. Tahap Persiapan dan Analisis

- Review Renstra OPD: Memastikan program dan kegiatan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) OPD.
- Review Hasil Evaluasi: Menganalisis capaian Renja tahun sebelumnya untuk menentukan keberlanjutan atau perbaikan.
- Analisis Isu Strategis & Pelayanan: Mengidentifikasi permasalahan pelayanan OPD, isu penting, dan SPM (Standar Pelayanan Minimal).

- Pengolahan Data & Informasi: Mengumpulkan data statistik dan data pelayanan OPD setidaknya 5 tahun terakhir.

2. Tahap Telaahan Rancangan Awal (Ranwal) RKPD

- Penelaahan Ranwal RKPD: Melakukan review terhadap arah kebijakan, prioritas pembangunan, dan sasaran dalam rancangan awal RKPD.
- Penyelarasan Program Prioritas: Penyelarasan program dan kegiatan prioritas di Renja OPD mendukung pencapaian sasaran RKPD.
- Identifikasi Usulan Masyarakat: Menelaah usulan masyarakat hasil Musrenbang untuk diintegrasikan jika sesuai.

3. Tahap Perumusan Rancangan Renja OPD

- Perumusan Tujuan & Sasaran: Menetapkan tujuan dan sasaran OPD yang selaras dengan indikator sasaran dalam Ranwal RKPD.
- Penyusunan Program, Kegiatan, Subkegiatan: Menginput usulan program/kegiatan yang mengacu pada struktur anggaran dan kebijakan RKPD.
- Penetapan Indikator & Pagu Indikatif: Menetapkan indikator kinerja (output/outcome) dan target kinerja serta pagu indikatif berdasarkan program prioritas di RKPD.
- Pelaksanaan Forum OPD: Melakukan dialog dengan pemangku kepentingan untuk menyepakati draf Renja.
- Penyesuaian Ranwal Renja: Menyesuaikan dokumen Renja berdasarkan hasil Forum OPD dan prioritas pembangunan daerah.

4. Tahap Penyusunan Rancangan Akhir

- Penyempurnaan Rancangan Akhir: Menyempurnakan Renja setelah menerima hasil verifikasi Bappeda/Bappelitbangda, terutama terkait konsistensi hasil musrenbang kota
- Sinkronisasi via SIPD: Menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk memastikan data sinkron antara Renja dan RKPD.

5. Tahap Penetapan

- Penetapan Renja OPD: Menetapkan Renja yang telah disempurnakan menjadi dokumen final (dokumen Perkada Renja PD) sebagai dasar penyusunan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran).

3. Persentase Implementasi rencana Kelitbangan

Indikator ini didukung oleh Program Penelitian dan Pengembangan Daerah. Capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 100 persen, Hal ini berhasil dicapai dengan disusunnya penelitian terkait Pengurangan Risiko Bencana Melalui Optimalisasi Fungsi Masjid Sebagai Tempat Evakuasi Tsunami.

Mewujudkan persentase implementasi rencana kelitbangan (Penelitian dan Pengembangan) yang tinggi memerlukan pendekatan terstruktur, mulai dari perencanaan yang realistis, sinergi dengan dokumen perencanaan daerah (RPJMD/RKPD), hingga pengawasan ketat.

Berikut adalah langkah-langkah sistematis yang dilakukan:

1. Tahap Perencanaan dan Penyelarasan

- Dasar Hukum: Memastikan adanya peraturan atau payung hukum yang kuat untuk mendukung pelaksanaan kelitbangan.
- Sinkronisasi dengan Dokumen Perencanaan (RPJMD/RKPD): Rencana kelitbangan harus diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) agar hasil kajian langsung relevan dengan kebijakan strategis daerah.
- Prioritisasi Usulan Kelitbangan: Mengelompokkan dan menetapkan prioritas usulan tema penelitian berdasarkan urusan pemerintahan, data dukung, dan ketersediaan anggaran.

2. Tahap Pelaksanaan dan Koordinasi

- Sinergitas dan Kolaborasi: Membangun kerjasama dengan berbagai pihak seperti Perguruan Tinggi, lembaga litbang lain, dan *stakeholder* terkait untuk mendorong inovasi.
- Metode Penelitian: Menggunakan mekanisme yang tepat dengan memantau kualitas metodologi dan substansi laporan.

3. Tahap Monitoring dan Evaluasi

- Monitoring dan Evaluasi Berkala: Melakukan pemantauan langsung, idealnya pada akhir tahun anggaran, untuk mengukur capaian fisik dan finansial rencana kelitbangan.

- Penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP): Mengadministrasikan seluruh proses kelitbangan sebagai data dukung dalam laporan kinerja, yang kemudian dinilai persentasenya.

4. Tahap Implementasi Hasil (Tindak Lanjut)

- Dokumentasi dan Publikasi: Mendokumentasikan hasil penelitian dan mempublikasikannya melalui laman internet untuk diseminasi pengetahuan.

3.2.1. Akuntabilitas Keuangan

Salah satu aspek akuntabilitas kinerja yang sangat penting adalah akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban institusi publik untuk menggunakan dana publik (public money) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas keuangan menjadi sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja keuangan organisasi kepada pihak internal dan pihak eksternal.

Anggaran Belanja Bappeda Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2025 sebelum Perubahan ditetapkan sebesar Rp.12.570.324.611,- dengan rincian belanja Operasi sebesar Rp.11.960.271.411,- dan belanja Modal sebesar Rp.610.053.200,-. Pemerintah Kota Banda Aceh merevisi APBK Tahun Anggaran 2025 untuk penyesuaian dana transfer sehingga Anggaran Belanja Bappeda Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2025 mengalami revisi, dimana Anggaran belanja Bappeda Pergeseran revisi ditetapkan sebesar Rp. 11.635.001.511,- yang dialokasi untuk belanja operasi sebesar Rp. 11.316.576.211,-. dan belanja Modal sebesar Rp.318.425.300,-. Sedangkan Pada Perubahan Anggaran alokasi belanja Bappeda ditetapkan sebesar Rp. 11.595.232.795,- , dengan alokasi untuk belanja operasi ditetapkan sebesar Rp. 11.341.913.995,- dan belanja modal sebesar Rp. 253.318.800,-.

Realisasi kegiatan yang telah di laksanakan oleh Bappeda per 31 desember 2025 cukup baik dengan terserapnya anggaran sebesar Rp. 11.067.805.506,- atau 95,45 persen dari alokasi anggaran belanja Bappeda. Anggaran belanja yang tidak terealisasikan sebesar Rp. 527.427.289,- atau 4,55 persen, disebabkan karena adanya selisih harga nego, tidak dilaksanakan lagi kegiatan karena tidak tersedianya Surat Penyediaan Dana (SPD) serta tidak dilakukan penarikan karena tidak ada kebutuhan lagi.

Urusan pemerintah daerah dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan Tugas pokok dan kewenangan yang dimilikinya. Pengalokasian belanja Program dan Kegiatan Bappeda tetap menggunakan pendekatan sistem skala prioritas dengan menfokuskan pada program untuk mendukung pelaksanaan program utama Urusan Wajib. Urusan Wajib adalah urusan yang diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Bappeda pada Tahun anggaran 2025 telah melaksanakan 2 (dua) urusan, 4 (empat) Program dan 15 (lima belas) kegiatan serta 32 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota telah dilaksanakan 6 (enam) kegiatan dan 13 Sub kegiatan

2. Program Perencanaan , Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pada Program Perencanaan , Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Untuk mencapai tujuan program telah dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan dan 8 (delapan) sub kegiatan.

3. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Pada Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Untuk mencapai tujuan program telah dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan dan 9 (sembilan) sub kegiatan.

4. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Pada Program Peneliitian Dan Pengembangan Daerah, Untuk mencapai tujuan program telah dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan.

Kinerja keuangan dapat diukur melalui:

1. Perbandingan antara realisasi dan rencana anggaran
2. Perbandingan realisasi antar periode

Perbandingan antara realisasi dan rencana anggaran tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini ;

Tabel 3.5
Perbandingan Antara Realisi dan Rencana Anggaran
Tahun Anggaran 2025

No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN / ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI		SISA ANGGARAN	
			KEUANGAN			
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	11.595.232.795	11.067.805.506	95,45	527.427.289	4,55
A	PROGRAM PENUNJANGAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BABUPATEN / KOTA	9.408.909.095	9.336.763.458	99,23	72.145.637	0,77
1	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.268.200	25.102.200	71,18	10.166.000	28,82
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.268.200	25.102.200	71,18	10.166.000	58,75
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.947.496.490	7.420.355.086	106,81	-472.858.596	-6,81
	Penyediaan Gaji Tunjangan ASN	6.947.496.490	7.420.355.086	106,81	-472.858.596	1,33
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	350.019.705	286.956.386	81,98	63.063.319	18,02
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.454.700	659.800	19,10	2.794.900	80,9
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	82.855.200	77.488.600	93,52	5.366.600	11,85
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.662.300	15.698.000	79,84	3.964.300	20,16
	Penyediaan Barang Cetakan Dan Pengadaan	23.502.800	20.868.300	88,79	2.634.500	11,21
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	220.544.705	172.241.686	78,10	48.303.019	21,9
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	253.318.800	160.969.600	63,54	92.349.200	36,46
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	253.318.800	160.969.600	63,54	92.349.200	58,79
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.286.460.000	1.028.836.786	79,97	257.623.214	20,03
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	401.000.000	211.154.836	52,66	189.845.164	52,99
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	885.460.000	817.681.950	92,35	67.778.050	16,4
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	536.345.900	414.543.400	77,29	121.802.500	22,71
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	400.036.300	285.470.800	71,36	114.565.500	39,02
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	108.066.000	100.829.000	93,30	7.237.000	13,35
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	28.243.600	28.243.600	100	0	0,00
B.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.567.529.100	1.396.088.048	89,06	171.441.052	10,94
1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.487.919.600	1.358.748.048	91,32	129.171.552	8,68

No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN / ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI		SISA ANGGARAN	
			KEUANGAN			
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	7.330.000	830.000	11,32	6.500.000	88,68
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	53.388.200	41.638.700	77,99	11.749.500	22,01
	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	11.070.600	9.682.100	87,46	1.388.500	12,54
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	134.229.400	129.126.800	96,2	5.102.600	3,80
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1.281.901.400	1.177.470.448	91,85	104.430.952	26,82
2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	28.385.000	28.385.000	100	0	0,00
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	28.385.000	28.385.000	100	0	0,00
3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	26.142.200	0	0,00	26.142.200	100
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	26.142.200	0	0,00	26.142.200	100
4	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	25.082.300	8.955.000	35,7	16.127.300	64,3
	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	25.082.300	8.955.000	35,7	16.127.300	64,3
C	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	458.134.100	187.866.500	41,01	270.267.600	58,99
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	122.598.400	69.795.400	56,93	52.803.000	43,07
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	44.795.400	38.275.400	85,44	6.520.000	25,09
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	71.820.000	30.690.000	42,73	41.130.000	58,64
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5.983.000	830.000	13,87	5.153.000	86,13
2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	174.509.600	63.737.500	36,52	110.772.100	63,48

No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN / ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI		SISA ANGGARAN	
			KEUANGAN			
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	58.370.000	26.555.000	45,49	31.815.000	54,51
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	104.039.600	37.182.500	35,74	66.857.100	70,03
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	12.100.000	0	0,00	12.100.000	100,00
3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	161.026.100	54.333.600	33,74	106.692.500	66,26
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infastruktur	74.547.600	32.787.600	43,98	41.760.000	56,02
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Insfrastruktur	24.095.000	17.745.000	73,65	6.350.000	26,35
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	62.383.500	3.801.000	6,09	58.582.500	93,91
D	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	160.660.500	147.087.500	91,55	13.573.000	8,45
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	32.780.500	22.087.500	67,38	10.693.000	32,62
	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				0	100,00
	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	32.780.500	22.087.500	67,38	10.693.000	32,62
2	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	127.880.000	125.000.000	97,75	2.880.000	2,25
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	127.880.000	125.000.000	97,75	2.880.000	2,25
	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	0	0	0,00	0	100,00
JUMLAH TOTAL		11.595.232.795	11.067.805.506	95,45	527.427.289	4,55

Dari tabel tersebut dapat dilihat dari empat program kegiatan yang dilaksanakan capaian realisasi tertinggi dari anggaran yang direncanakan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp.9.408.909.095,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 9.336.763.458,- atau 99,23 persen, anggaran yang tidak direalisasikan lagi sebesar 0,77 persen. Sedangkan pada

Program Perencanaan , Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp.1.567.529.100,- dapat direalisasikan sebesar Rp.1.396.088.048,- atau 89,06 persen. Sedangkan Pada Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dapat direalisasikan sebesar Rp.187.866.500,- atau 41,01 persen dari anggaran yang direncanakan. Dan Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah dari rencana anggaran sebesar Rp.160.660.500,- terealisasi sebesar Rp. 147.087.500,- atau 91,55 persen dari rencana anggaran yang ditargetkan. Secara keseluruhan persentase realisasi belanja Bappeda Tahun anggaran 2025 sebesar 95,45 persen mengalami kenaikan dibandingkan dengan anggaran 2024.

Selama 5 (lima) tahun terakhir rasio antara anggaran dan realisasi belanja rata-rata persentasenya pertahunnya mengalami fluktuasi kecendrungan meningkat ini menunjukkan kinerja kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan yang direncanakan

Tabel 3.5
Perkembangan Realisasi Anggaran Belanja Bappeda Kota Banda
Aceh Tahun Anggaran 2021 s/d 2025

URAIAN	RASIO ANTARA ANGGARAN DAN REALISASI				
	%				
	2021	2022	2023	2024	2025
BELANJA	84,33	88,06	82,02	83,24	95.45
BELANJA PEGAWAI	102,53	96,97	99,06	106,23	106,81
BELANJA BARANG DAN JASA	68,84	79,94	64,95	56,56	79,34
BELANJA MODAL	100,00	100,00	0,00	0,00	63,54

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa kinerja Bappeda tahun 2025 dalam merealisasikan anggaran belanja menunjukkan kenaikan realisasi dari tahun anggaran 2024.

3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Bappeda Propinsi Aceh

Dalam perjanjian kinerja tahun 2024 Bappeda Aceh mempunyai 2 (dua) sasaran strategis dengan 6 (enam) indikator kinerja.

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Renstra 2023-2026

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas Fungsi Perangkat Daerah	Target 2024	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analisis
			2023 (n)	2024 (n+1)	2025 (n+2)	2026 (n+3)	2023 (n-1)	2024 (n)	2025 (n+1)	
1	Penjabaran Konsistensi Program RPD kedalam RKPD	100	100	100	100	100	100	100	100	Target tercapai
2	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	100	100	100	100	100	100	100	100	Target tercapai
3	pertumbuhan Ekonomi	5,17	3,6	3,75	3,85	4,25	4,15	5,17	3,85	Target tercapai
4	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	90	75	89	92	98	75	90	92	Target tercapai
5	Indeks Inovasi Daerah Aceh	55	51	55	60	65	55,38	55,87	60	Target tercapai
6	Pertumbuhan 10% per tahun (APBA, PAA, CSR, dan Dana LSM)	10	10	10	10	10	-30,67	6,17	10	Tidak tercapai

Sumber : LKJIP Bappeda Aceh Tahun 2024

Dari tabel di atas yang relevan dengan Indikator Kinerja Utama Bappeda Kota Banda Aceh adalah point IK1 yaitu Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD. Persentase konsistensi dokumen RPJMD Terhadap dokumen RKPD pada tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar 100% atau mencapai target, dimana program, kegiatan dan pendanaan disusun seluruhnya berdasarkan dokumen RPJMD.

3.4 Predikat SAKIP Kabupaten/Kota di Indonesia

Rata-rata nilai SAKIP kabupaten/kota di Indonesia tahun 2024 mencapai 64,23, meningkat 0,18 poin dari tahun sebelumnya, menandakan perbaikan akuntabilitas kinerja. Kota Surabaya berhasil meraih predikat tertinggi AA (sangat memuaskan) pada 2024, menunjukkan komitmen kuat dalam implementasi SAKIP.

Poin Kunci SAKIP Kabupaten/Kota tahun 2024:

- Predikat Tertinggi (AA): Kota Surabaya dan Kabupaten Banyuwangi meraih predikat tertinggi, disusul 20 pemerintah daerah dengan predikat A.
- Sebaran Nilai: Mayoritas pemerintah kabupaten/kota (85,5%) meraih predikat B hingga BB, dengan peningkatan signifikan pada 48 pemda yang mencapai predikat B termasuk Pemerintah Kota Banda Aceh dengan Nilai 62,75.
- Fokus Peningkatan: SAKIP 2024 difokuskan pada integrasi perencanaan dan anggaran, penyelarasan kinerja, serta pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran.

- Tantangan: Masih terdapat 79 kabupaten/kota yang memerlukan pembinaan intensif karena memiliki nilai CC, C, hingga D.

Secara umum, evaluasi SAKIP tahun 2024 menunjukkan peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja di tingkat kabupaten/kota dibandingkan tahun sebelumnya.

Untuk nilai akuntabilitas kinerja organisasi BAPPEDA di 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan fluktuasi yang cukup mencolok, khususnya di tahun 2023 terjadi penurunan nilai yang cukup signifikan dari angka 80,55 dengan nilai A di tahun 2022, menjadi 69,2 dengan kategori B di tahun 2023. Hal ini menurut pihak Inspektorat terjadi karena adanya perubahan metode penghitungan skor nilai disetiap komponen. Namun demikian, setelah dilakukan perbaikan dan tindak lanjut sesuai masukan Inspektorat, angka tersebut kembali meningkat di tahun 2024 sehingga kinerja BAPPEDA kembali memperoleh kategori BB dengan poin nilai mencapai 80. Rincian nilai SAKIP BAPPEDA selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.7
Capaian SAKIP BAPPEDA Kota Banda Aceh 2020 – 2024

No	Komponen yang Dinilai	2020	2021	2022	2023	2024	Ket
1	Perencanaan Kinerja	-	27,60	26,10	21	24	
2	Pengukuran Kinerja	-	25,80	23,70	19,5	24	
3	Pelaporan Kinerja	-	12,15	12,75	11,7	12	
4	Evaluasi Internal	-	21,25	18,00	17	20	
	Total Nilai	-	86,80	80,55	69,2	80	
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A	A	B	BB	

Sumber: Inspektorat Kota Banda Aceh

3.5 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsinya, BAPPEDA tidak lepas dari berbagai permasalahan dan hambatan. Berikut adalah beberapa hal yang menjadi perhatian BAPPEDA Kota Banda Aceh:

1. Belum optimalnya koordinasi dengan dan antar OPD serta stakeholders terkait.

Untuk dapat tercapainya efisiensi, efektifitas dan produktifitas dari setiap kegiatan pembangunan, perlu dilakukan koordinasi antar instansi terkait, Diperlukan sebuah Teamwork yang kuat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Pengalaman menunjukkan bahwa beberapa kegiatan pembangunan masih belum dilakukan secara terkoordinasi, akibatnya hasil pembangunan menjadi kurang maksimal, tumpang tindih, tidak efisien dan tidak efektif.

2. Keterbatasan ketersediaan data perencanaan pembangunan.

Data sangat diperlukan dalam kegiatan perencanaan. Semakin lengkap data maka semakin tepat pula target dan sasaran perencanaan. Kenyataannya, data khususnya yang bersumber dari OPD sangat sulit untuk dikumpulkan dan cenderung berubah-ubah. Hal ini menjadi salah satu penghambat dalam menyusun perencanaan yang baik.

3. Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Seluruh aktivitas perencanaan saat ini menggunakan sistem elektronik yang terintegrasi dengan pemerintah pusat. Untuk itu seluruh aparatur perencanaan harus mampu dan familiar dengan sistem TIK agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Tidak hanya mampu menggunakan, aparatur perencana juga harus mampu mengajarkan dan membina OPD dibawah koordinasinya masing-masing agar mampu menggunakan TIK dalam proses penyusunan dokumen perencanaannya. Sistem GIS juga menjadi bagian dari penerapan TIK dalam kegiatan perencanaan. Saat ini jumlah ASN yang mengerti mengenai sistem GIS sangat terbatas, sehingga seluruh posisinya diisi oleh tenaga Non ASN.

4. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi hasil (*outcome*) pembangunan.

BAPPEDA menjalankan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Hasil dari kegiatan ini menjadi masukan dan dasar bagi perbaikan rencana program dan kegiatan dimasa mendatang. Selama ini tidak seluruh hasil monitoring dan evaluasi dapat digunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan ditahun berikutnya. Hal ini disebabkan masih kurangnya penjelasan detail mengenai berbagai alasan dan hambatan dari terkendalanya suatu kegiatan atau sub kegiatan.

5. Minimnya penelitian dan inovasi daerah.

Sepertinya halnya hasil evaluasi, penelitian juga menjadi salah satu dasar dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. Dalam berbagai diskusi dengan stakeholders pembangunan, ditemukan bahwa berbagai penelitian yang terkait dengan penilaian potensi daerah, identifikasi akar masalah sosial ekonomi serta infrastruktur perkotaan sangat diperlukan untuk mendukung perencanaan yang baik.

Tantangan:

- Perubahan SOTK Baru dari BAPPEDA menjadi BAPPERIDA.
- Konsep Pembangunan Indonesia Emas 2025 - 2045
- Stabilitas dan kebijakan keuangan daerah Kota Banda Aceh

Peluang:

- Perubahan SOTK Baru dari BAPPEDA menjadi BAPPERIDA.
- Konsep Pembangunan Indonesia Emas 2025 - 2045

Berdasarkan beberapa kendala dan hambatan utama tersebut, solusi yang perlu dilakukan antara lain:

1. Memanfaatkan sumber daya (SDM) yang ada untuk tetap bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.
2. Mengoptimalkan koordinasi antar OPD serta stakeholders terkait.
3. Mengirimkan pegawai untuk mengikuti diklat khususnya terkait perencanaan.
4. Meningkatkan koordinasi kepada produsen data perencanaan agar dapat menghasilkan data yang valid, up to date, dan berkesinambungan.
5. Meningkatkan fungsi monitoring dan evaluasi program kegiatan pembangunan sebagai salah satu penentu keberhasilan perencanaan pembangunan daerah.
6. Meningkatkan penelitian perencanaan pembangunan.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2025 menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja Institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Bappeda Kota Banda Aceh, LKjIP menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban Bappeda Kota Banda Aceh untuk kepentingan internal dan kepentingan eksternal (publik) dalam upaya mendorong akuntabilitas institusi pemerintahan. Bagi kepentingan internal, LKjIP dapat dijadikan instrumen untuk mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan sasaran strategis yang menunjukkan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2025. Sementara bagi kepentingan eksternal (publik), LKjIP menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan Bappeda Kota Banda Aceh dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam perencanaan pembangunan.

Secara keseluruhan hasil pencapaian kinerja Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2025 dapat terlihat dari rata-rata persentase realisasi terhadap target indikator sasaran pada tahun 2025 mencapai 100 persen, yang berarti bahwa Skala Nilai Peringkat Kinerja Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2025 berada pada kriteria sangat tinggi. Namun keberhasilan pencapaian target indikator sasaran strategis Bappeda Kota Banda Aceh sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dan dunia usaha sebagai bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari sistem perencanaan pembangunan. Oleh karena itu peningkatan kinerja tetap harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan kualitas pembangunan, sehingga sasaran strategis yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kota Banda Aceh periode Tahun 2023-2026 dapat terwujud.



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh
Jl. Nyak Adam Kamil No. 19A Banda Aceh Telp (0651) 32398 Fax (0651) 32397
Website <https://bappeda.bandaacehkota.go.id>